PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

UNIT KERJA : **BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDHY HENDRO WIJAYA**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **256151**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — **Rp. 2.700.000.000**

1. Tanah Seluas 2.580 m2 di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI , Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/165 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — **Rp. 698.750.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
5. MOTOR, VESPA PRIMAVERA 150 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
6. MOTOR, YAMAHA VEGA R Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — **Rp. 96.000.000**

D. SURAT BERHARGA — **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS — **Rp. 98.599.000**

F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**3.593.349.000**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**909.767.596**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**2.683.581.404**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.